

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu keberlanjutan kini semakin memperoleh perhatian serius dalam dunia usaha di Indonesia. Meningkatnya kesadaran akan tanggung jawab sosial dan lingkungan mendorong regulator, investor, serta masyarakat untuk menuntut tingkat transparansi yang lebih besar dari perusahaan. Salah satu wujud nyata dari perubahan tersebut adalah diberlakukannya kewajiban penyampaian perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, yang diperkuat oleh Surat Edaran OJK No. 16/SEOJK.04/2021 yang mengatur ketentuan ini.

Regulasi ini lahir sebagai bentuk implementasi komitmen Indonesia terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan penguatan praktik *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam dunia usaha. Melalui kebijakan tersebut, OJK menegaskan bahwa pelaporan keberlanjutan bukan lagi bersifat sukarela, melainkan menjadi kewajiban bagi perusahaan publik sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi terhadap para pemangku kepentingan. Fenomena ini menunjukkan pergeseran paradigma dari sekadar orientasi profit menuju orientasi keberlanjutan jangka panjang, di mana perusahaan dituntut untuk tidak hanya mempertanggungjawabkan kinerja keuangan, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas

operasionalnya (Prameswari et al., 2022).

Sektor properti menjadi salah satu sektor yang paling terdampak oleh perubahan kondisi ekonomi makro dan kebijakan moneter, sehingga berisiko tinggi mengalami *financial distress*. Dalam beberapa tahun terakhir, kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia, peningkatan harga bahan baku konstruksi, dan pengetatan pembiayaan perbankan menekan kinerja perusahaan properti secara signifikan. Selain itu, adanya kelebihan pasokan (*oversupply*) pada segmen tertentu seperti apartemen dan kawasan komersial menyebabkan penurunan tingkat penjualan dan arus kas perusahaan. Kondisi ini membuat banyak perusahaan kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya, yang menunjukkan perkembangan terjadinya *financial distress*.

Sektor properti dipilih dalam penelitian ini karena memiliki karakteristik padat modal, tingkat leverage tinggi, serta ketergantungan besar terhadap pembiayaan eksternal, yang menjadikannya lebih rentan terhadap tekanan keuangan dibandingkan sektor lain. Fenomena *financial distress* dalam industri properti juga berpotensi memengaruhi kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan, karena perusahaan cenderung memfokuskan sumber daya pada penyelamatan keuangan daripada pengungkapan informasi keberlanjutan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana kondisi *financial distress* memengaruhi kemampuan perusahaan properti dalam melaksanakan kewajiban SRD yang telah ditetapkan oleh OJK. (Wahyudi, 2021).

Selain *financial distress*, profitabilitas juga merupakan faktor

fundamental yang dapat memengaruhi tingkat keterbukaan perusahaan dalam mengungkapkan laporan keberlanjutan. Profitabilitas menggambarkan kemampuan sebuah bisnis untuk menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasionalnya. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki sumber daya finansial yang memadai untuk mendanai program keberlanjutan, seperti kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) dan penerapan kebijakan ramah lingkungan. Sebaliknya, perusahaan dengan profitabilitas rendah akan memprioritaskan efisiensi biaya dan cenderung mengabaikan aspek non-keuangan seperti pelaporan keberlanjutan Liang et al. (2020).

Dalam konteks *Sustainability Report Disclosure*, profitabilitas berperan penting karena menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu memenuhi tuntutan akuntabilitas publik. Hal ini sejalan dengan *Stakeholder Theory* (Freeman, 1984) yang menekankan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang relevan kepada seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk investor, pelanggan, karyawan, dan masyarakat luas.

By market capitalisation <i>In per cent</i>	Global	China	Dev. AP excl. US	Em. Asia excl. China	Europe	Latin America	Middle East and Africa	United States	Others
Basic Materials	88	65	93	90	99	87	79	98	66
Consumer Cyclical	92	62	92	81	99	88	48	95	65
Consumer Non-Cyclical	84	83	95	90	99	90	81	76	47
Energy	94	93	93	91	99	91	98	95	32
Financials	94	99	97	92	98	82	84	92	49
Healthcare	91	68	85	89	99	92	74	92	41
Industrials	89	65	93	88	97	89	57	95	45
Real Estate	78	69	90	82	79	75	50	86	0
Technology	94	65	96	94	98	94	83	96	53
Water & Related Utilities	81	49	89	74	99	94	71	94	0

Gambar 1. 1 Perbandingan Tingkat Sustainability Report Disclosure Antar Sektor

Perusahaan dan Regional Tahun 2024 OECD (2025)

Data OECD (2025) pada Gambar 1.1 menunjukkan bahwa tingkat *sustainability information disclosure* berbeda antar sektor usaha, di mana kategori properti memiliki tingkat pengungkapan yang relatif lebih rendah dibandingkan beberapa kategori lainnya. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa implementasi pelaporan keberlanjutan belum sepenuhnya menunjukkan tingkat keseragaman, meskipun regulasi dan standar pelaporan telah berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam konteks sektor properti di Indonesia, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *sustainability report disclosure*. Permasalahan penelitian ini difokuskan pada *sustainability report disclosure*, yaitu tingkat pengungkapan informasi keberlanjutan yang disampaikan perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Tingkat pengungkapan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai karakteristik internal perusahaan.

Berdasarkan perspektif *Agency Theory* (Jensen & Meckling, 1976), keputusan pengungkapan informasi merupakan bagian dari mekanisme pengurangan asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham. Kondisi keuangan perusahaan dapat memengaruhi kapasitas serta kecenderungan manajemen dalam melakukan pengungkapan informasi keberlanjutan. Selain itu, mekanisme pengawasan melalui tata kelola perusahaan, khususnya keberadaan komisaris independen, berperan dalam

memperkuat fungsi monitoring dan mendorong transparansi. Oleh karena itu, penelitian ini menguji pengaruh kondisi keuangan terhadap sustainability report disclosure dengan mempertimbangkan peran mekanisme pengawasan sebagai variabel moderasi.

Harymawan et al. (2021) menyatakan GCG berperan krusial dalam menjaga kualitas *Sustainability Report Disclosure*, khususnya ketika Perusahaan menghadapi tekanan keuangan, yang dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas pelaporan mereka. Sistem tata kelola perusahaan yang dikenal sebagai GCG berbasis pada prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. dengan tujuan memastikan seluruh kegiatan perusahaan selaras dengan kepentingan para pemangku kepentingan. Dalam praktiknya, mekanisme GCG tidak hanya diwujudkan melalui pengawasan internal, seperti keberadaan komisaris independen, tetapi juga melalui pengawasan eksternal, salah satunya melalui kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional menunjukkan besarnya porsi saham yang dimiliki oleh institusi yang memiliki kapasitas monitoring lebih kuat terhadap kebijakan manajemen, sehingga dapat mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, termasuk dalam pengungkapan *sustainability report disclosure*.

Dalam penelitian ini, mekanisme Good Corporate Governance (GCG) diprosikan melalui proporsi komisaris independen dan kepemilikan institusional sebagai representasi fungsi pengawasan perusahaan. Komisaris independen berperan dalam meningkatkan efektivitas monitoring terhadap

kebijakan manajemen, sedangkan kepemilikan institusional mencerminkan pengawasan eksternal oleh investor institusi yang memiliki kepentingan jangka panjang dan kapasitas pengendalian yang lebih kuat. Dalam kondisi tekanan keuangan, kedua mekanisme ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan sehingga perusahaan tetap mempertahankan tingkat sustainability report disclosure, sehingga diposisikan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini.

Keterkaitan antara GCG dan SRD dapat dijelaskan melalui beberapa teori utama. *Legitimacy Theory* (Suchman, 1995) menyatakan bahwa Perusahaan berusaha mendapatkan serta menjaga legitimasi dari masyarakat dengan menyampaikan laporan keberlanjutan yang merefleksikan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. *Stakeholder Theory* (Freeman, 1984) menjelaskan bahwa pengungkapan laporan keberlanjutan merupakan bentuk pemenuhan kewajiban moral dan informasi perusahaan kepada seluruh pihak yang berkepentingan, seperti investor, karyawan, dan masyarakat. Sementara itu, *Agency Theory* (Jensen & Meckling, 1976) menegaskan bahwa penerapan GCG, baik melalui pengawasan dewan maupun tekanan dari pemegang saham institusional, berfungsi meminimalkan potensi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham melalui peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan.

Stakeholder Theory (Freeman, 1984) menjelaskan bahwa pengungkapan laporan keberlanjutan merupakan bentuk pemenuhan

kewajiban moral dan informasi perusahaan kepada seluruh pihak yang berkepentingan, seperti investor, karyawan, dan masyarakat. Sementara itu, *Agency Theory* (Jensen & Meckling, 1976) menekankan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mengurangi kepentingan manajemen dan pemegang saham.

Profitabilitas perusahaan juga memiliki peran penting dalam pengungkapan laporan keberlanjutan. Bisnis yang lebih menguntungkan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menyediakan dana untuk pengelolaan keberlanjutan dan memenuhi kewajiban pelaporan. Penelitian oleh Sethi & Mahadik (2025) mencatat bahwa perusahaan dengan tingkat *profitabilitas* yang memiliki tinggi cenderung lebih aktif dalam pengungkapan informasi terkait *environmental* dan *social* dampak operasional mereka, yang berhubungan langsung dengan kualitas *Sustainability Report Disclosure* mereka.

Profitabilitas dapat meningkatkan kualitas pengungkapan, perusahaan yang mengalami *financial distress* tetap memiliki kendala dalam mempertahankan kualitas pengungkapan mereka. Dalam kondisi *financial distress*, perusahaan akan lebih fokus pada pemulihan keuangan dan kurang memperhatikan pengungkapan yang terkait dengan keberlanjutan, meskipun mereka diharuskan oleh regulasi untuk melaporkan informasi terkait ESG.

Profitabilitas diukur dengan Return on Assets (ROA), yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari semua

aset yang dimilikinya, baik dari utang maupun modal sendiri. ROA dianggap lebih komprehensif daripada Return on Equity (ROE), yang hanya mengukur tingkat pengembalian dari ekuitas pemegang saham. Pemilihan ROA juga didasarkan pada karakteristik sektor properti yang padat modal (*capital intensive*), di mana sebagian besar aset perusahaan berasal dari pembiayaan eksternal seperti pinjaman bank dan utang proyek. Oleh karena itu, ROA dianggap lebih relevan untuk menunjukkan efisiensi manajemen dalam memanfaatkan total aset untuk memperoleh keuntungan serta mendukung kemampuan perusahaan dalam mengungkapkan *Sustainability Report Disclosure*.

Peran *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan menjadi semakin penting, terutama ketika perusahaan menghadapi *financial distress*. Penelitian oleh Li et al. (2021) menunjukkan bahwa GCG dapat memperkuat hubungan antara *financial distress* dan pengungkapan *sustainability report*, dengan memastikan bahwa meskipun perusahaan menghadapi kesulitan keuangan, mereka tetap dapat mempertahankan standar transparansi yang tinggi dalam pelaporan keberlanjutan mereka.

Regulasi yang semakin ketat mengenai pengungkapan *Sustainability Report Disclosure* membuat perusahaan terpaksa menyesuaikan diri dengan standar yang ditetapkan oleh OJK. Penelitian oleh Widjaja & Yanti (2025) menunjukkan bahwa pengungkapan laporan keberlanjutan menjadi lebih relevan dalam konteks regulasi baru ini, yang mendorong perusahaan untuk

lebih transparan meskipun menghadapi tantangan keuangan.

Dalam konteks sektor properti di Indonesia, perusahaan harus menghadapi tantangan yang lebih besar terkait pengelolaan dampak sosial dan lingkungan. Penurunan *profitabilitas* atau munculnya *financial distress* sering kali menjadi penghalang bagi perusahaan untuk berfokus pada pengelolaan keberlanjutan mereka. Harymawan et al. (2021) menyatakan bahwa perusahaan properti yang tertekan secara finansial sering kali terpaksa mengurangi anggaran untuk pengelolaan dampak sosial dan lingkungan mereka, yang mengarah pada penurunan kualitas pengungkapan *sustainability report*.

Penerapan *Good Corporate Governance* yang baik dapat memoderasi hubungan antara *financial distress* dan pengungkapan *sustainability report*. Penelitian oleh Kanoujiya et al. (2023) menekankan pentingnya GCG dalam memastikan bahwa meskipun perusahaan berada dalam tekanan finansial, mereka tetap dapat melakukan pengungkapan secara transparan dan akuntabel. GCG memiliki peran sentral dalam meminimalkan dampak negatif *financial distress* terhadap kualitas pengungkapan informasi terkait keberlanjutan.

Salah satu tantangan utama dalam sektor properti adalah pengelolaan laporan keberlanjutan dalam kondisi *financial distress*. Perusahaan yang menghadapi kesulitan finansial sering kali lebih fokus pada pemulihan kondisi keuangan dan kurang memberikan perhatian pada kualitas pengungkapan *sustainability report*. ini diperparah dengan peningkatan

regulasi yang mengharuskan pengungkapan lebih banyak terkait dengan dampak sosial dan lingkungan (Wahyudi, 2021). Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa meskipun dalam kondisi sulit, mereka tetap dapat menjaga standar transparansi yang tinggi dalam pengungkapan informasi keberlanjutan.

Pengaruh *profitabilitas* terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan sudah banyak dibahas, hubungan antara *financial distress* dan kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan masih perlu dikaji lebih mendalam. Penelitian oleh Kanoujiya (2023) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas atau pendapatan tinggi cenderung lebih aktif dalam mengungkapkan data tentang dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan operasionalnya, yang berhubungan langsung dengan kualitas pengungkapan sustainability report. Sementara itu, perusahaan yang mengalami *financial distress* sering kali terpaksa mengurangi kualitas pengungkapan tersebut, meskipun ada regulasi yang mengharuskan mereka untuk tetap transparan.

Good Corporate Governance berperan sebagai penghubung yang penting antara kondisi keuangan perusahaan dan kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan. Liang (2020) menunjukkan bahwa dengan menerapkan GCG yang baik, perusahaan akan lebih transparan dalam pengungkapan informasi terkait ESG, meskipun mereka sedang menghadapi tekanan finansial. GCG berfungsi sebagai mekanisme yang memastikan perusahaan tetap menjaga standar tinggi dalam pelaporan keberlanjutan,

bahkan ketika mereka menghadapi tantangan besar.

Penelitian oleh Harymawan (2021) mengungkapkan bahwa dalam situasi *financial distress*, perusahaan sering kali mengurangi pengeluaran mereka untuk pengelolaan keberlanjutan, yang berakibat pada pengurangan kualitas pengungkapan sustainability report. Meskipun demikian, perusahaan yang memiliki *Good Corporate Governance* yang kuat cenderung lebih mampu mempertahankan kualitas pengungkapan tersebut, karena GCG memfasilitasi proses pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

Profitabilitas juga berhubungan positif dengan pengungkapan laporan keberlanjutan. Penelitian yang oleh Sethi & Mahadik (2025) menggambarkan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi umumnya memiliki komitmen yang lebih kuat dalam menjalankan pengelolaan serta pengendalian dampak sosial dan lingkungan atas aktivitas operasionalnya. yang berujung pada pengungkapan sustainability report yang lebih baik. Hal ini mencerminkan kemampuan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya lebih banyak untuk meningkatkan kualitas laporan mereka, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik dan pemangku kepentingan.

Kondisi *financial distress* dapat memperburuk kualitas pengungkapan tersebut, meskipun *profitabilitas* perusahaan masih baik. Penelitian oleh Kanoujiya (2023) mencatat bahwa meskipun perusahaan dengan *profitabilitas* tinggi lebih cenderung melakukan pengungkapan secara transparan, perusahaan yang mengalami kesulitan finansial sering kali terpaksa menurunkan kualitas pengungkapan mereka. Hal ini dapat

merugikan perusahaan dalam jangka panjang, karena pemangku kepentingan cenderung menilai pengungkapan yang buruk sebagai indikasi kurangnya tanggung jawab sosial perusahaan.

Pengaruh GCG terhadap pengungkapan *sustainability report* sangat penting, terutama dalam mengurangi dampak negatif dari *financial distress*. GCG dapat memastikan bahwa meskipun perusahaan mengalami kesulitan finansial, mereka tetap dapat memenuhi kewajiban pelaporan mereka dengan transparan. Li et al. (2021) mengungkapkan bahwa GCG yang baik membantu perusahaan dalam menjaga kualitas pengungkapan informasi keberlanjutan meskipun dihadapkan pada situasi yang sulit.



Sumber: BIS, Analisis [The](#) Indonesia Economic Intelligence (IEI)

Gambar 1. 2 Grafik Pertumbuhan Sektor Properti 2024

Grafik ini menggambarkan proyeksi pertumbuhan sektor properti di Indonesia pada tahun 2024, yang mencakup beberapa faktor utama yang memengaruhi sektor ini, seperti tingkat permintaan rumah, harga properti, dan tingkat suku bunga kredit. Data yang disajikan dalam grafik

menunjukkan adanya penguatan pasar properti, yang diprediksi akan terus meningkat setelah beberapa tahun mengalami penurunan yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19.: Grafik ini terkait langsung dengan variabel *financial distress* dalam penelitian ini.

Kondisi pasar properti yang membaik dapat berdampak terhadap kondisi *financial distress* pada perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ketika sektor properti mengalami pemulihan, perusahaan akan lebih mudah memperoleh pendanaan dan lebih mampu untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas *Sustainability Report Disclosure* mereka. Hal ini relevan dengan peran GCG, yang dapat memastikan perusahaan tetap transparan dalam pengungkapan keberlanjutan meskipun menghadapi tantangan ekonomi. Grafik ini menunjukkan bagaimana kondisi sektor properti dapat memengaruhi kualitas pengungkapan informasi terkait keberlanjutan perusahaan dalam industri properti di Indonesia.

Perusahaan sektor properti di Indonesia harus memperhatikan pentingnya *Good Corporate Governance* dalam menghadapi kondisi *financial distress*. GCG yang baik dapat memperbaiki kualitas pengungkapan *sustainability report* meskipun perusahaan berada dalam tekanan keuangan. Penelitian oleh Rohman & Suhardianto (2024) menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan GCG yang efektif dapat mengurangi dampak negatif dari *financial distress* terhadap kualitas laporan keberlanjutan mereka.

Perusahaan yang mengalami *financial distress* atau kesulitan

keuangan memiliki kecenderungan untuk mengurangi pengeluaran yang tidak langsung berdampak pada pemulihan kondisi keuangan mereka, termasuk pengelolaan dan pengungkapan laporan keberlanjutan. Harymawan et al. (2021) mencatat bahwa pengurangan pengeluaran ini sering kali mengarah pada pengurangan kualitas pengungkapan *sustainability report*, yang berdampak pada kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya terhadap perusahaan.

Perusahaan dengan *GCG* yang baik dapat mengelola *sustainability report disclosure* secara efektif, meskipun berada dalam kondisi yang sulit secara finansial. Penelitian oleh Prameswari et al. (2022) menunjukkan bahwa *GCG* dapat memperkuat pengungkapan *sustainability report* perusahaan, memastikan bahwa meskipun dihadapkan pada kesulitan finansial, perusahaan tetap dapat berkomitmen pada transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari pengaruh *financial distress* dan *profitabilitas* terhadap pengungkapan *sustainability report*, dengan *Good Corporate Governance (GCG)* sebagai variabel moderasi pada perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020–2024. Fenomena *financial distress* yang dialami banyak perusahaan properti pasca-pandemi COVID-19 telah memengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban finansial dan, pada saat yang sama, mengurangi kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan mereka. Sementara itu, *profitabilitas* perusahaan memiliki peran penting dalam mendorong pengungkapan

informasi terkait dampak sosial dan lingkungan operasional mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam literatur yang ada, dengan menguji peran *Good Corporate Governance* dalam memoderasi hubungan antara kondisi finansial yang sulit dan kualitas pengungkapan keberlanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Sustainability Report Disclosure* pada perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020–2024?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Sustainability Report Disclosure* pada perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020–2024?
3. Apakah *Good Corporate Governance (GCG)* memoderasi pengaruh *Financial Distress* terhadap *Sustainability Report Disclosure* pada perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 – 2024?
4. Apakah *Good Corporate Governance* memoderasi pengaruh *Profitabilitas* terhadap *Sustainability Report Disclosure* pada perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020–2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis

pengaruh *Financial Distress* dan *Profitabilitas* terhadap *Sustainability Report Disclosure* pada perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020– 2024, dengan mempertimbangkan peran moderasi dari *Good Corporate Governance (GCG)*. Secara lebih rinci, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah *Financial Distress* memengaruhi kualitas *Sustainability Report Disclosure* pada perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020–2024.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah *Profitabilitas* berpengaruh terhadap *Sustainability Report Disclosure* pada perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020–2024.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis peran *Good Corporate Governance* dalam memoderasi pengaruh *Financial Distress* terhadap *Sustainability Report Disclosure* pada perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis peran *Good Corporate Governance* dalam memoderasi pengaruh *Profitabilitas* terhadap *Sustainability Report Disclosure* pada perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat Teoritis

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur yang ada, khususnya dalam bidang akuntansi keberlanjutan dan tata kelola

perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat:

Menambah pemahaman tentang pengaruh *Financial Distress* dan *Profitabilitas* terhadap kualitas *Sustainability Report Disclosure* pada perusahaan properti, serta memberikan pandangan baru terkait pengaruh *Good Corporate Governance* sebagai faktor moderasi dalam hubungan tersebut.

1. Memberikan bukti empiris mengenai hubungan antara faktor-faktor keuangan dan pengungkapan keberlanjutan dalam sektor properti yang kurang mendapat perhatian dalam penelitian sebelumnya.
2. Memperluas penerapan teori-teori yang relevan, seperti *Agency Theory*, *Stakeholder Theory*, dan *Legitimacy Theory*, untuk memahami bagaimana *Good Corporate Governance* dapat memengaruhi kualitas *Sustainability Report Disclosure* dalam kondisi financial distress dan profitabilitas yang berbeda.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Bagi perusahaan properti:** Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi perusahaan dalam memahami pentingnya *Sustainability Report Disclosure* dan peran *Good Corporate Governance* dalam menjaga kualitas pengungkapan meskipun menghadapi tantangan keuangan. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mengoptimalkan strategi pelaporan keberlanjutan.
2. **Bagi investor:** Penelitian ini dapat membantu investor dalam menilai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keberlanjutan perusahaan properti,

yang menjadi indikator penting dalam pengambilan keputusan investasi. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pengungkapan keberlanjutan, investor dapat lebih bijak dalam memilih perusahaan yang berkomitmen terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan.

3. **Bagi regulator:** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengevaluasi seberapa efektivitas kebijakan yang mewajibkan *Sustainability Report Disclosure* bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, khususnya dengan mempertimbangkan pengaruh faktor-faktor keuangan seperti *Financial Distress* dan Profitabilitas terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan.
4. **Bagi akademisi:** Diharapkan bahwa penelitian ini akan berfungsi sebagai referensi untuk penelitian lain di bidang yang sama, terutama yang menggabungkan *Good Corporate Governance*, *Financial Distress*, dan pengungkapan keberlanjutan dalam sektor properti.